

**PENGARUH TINGKAT PUTUS SEKOLAH, KEMISKINAN DAN
PENGANGGURAN TERHADAP KRIMINALITAS DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S1) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

MAULIDYA RAHMI
2014/14060095

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH TINGKAT PUTUS SEKOLAH, KEMISKINAN DAN
PENGANGGURAN TERHADAP KRIMINALITAS DI INDONESIA**

Nama : Maulidya Rahmi
NIM/TM : 14060095 /2014
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2018

Diketahui Oleh:

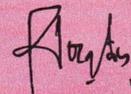
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Drs. Ali Anis, M.S
NIP. 19591129 198602 1 001

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Melti Roza Adry, SE. ME
NIP. 19830505 200604 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

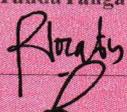
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH TINGKAT PUTUS SEKOLAH, KEMISKINAN
DAN PENGANGGURAN TERHADAP KRIMINALITAS DI
INDONESIA**

Nama : Maulidya Rahmi
NIM/TM : 14060095/2014
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Fakultas : Ekonomi

Padang, 2018

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Melti Roza Adry, SE. ME	1. 
2.	Anggota	: Prof. Dr. Hasdi Aimon, M. Si	2. 
3.	Anggota	: Drs. Zul Azhar, M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Maulidya Rahmi
NIM / Tahun Masuk : 14060095 / 2014
Tempat / Tanggal Lahir : Padang / 12 Mei 1996
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komp. Padang Sarai Pratama Blok i no. 02,
Lubuk Buaya, Padang
No. HP / Telepon : 082387788037
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Putus Sekolah, Kemiskinan
Dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas Di
Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis / skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis / skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis / skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, *Agustus* 2018



Yang menyatakan,

Maulidya Rahmi
NIM. 14060095/2014

ABSTRAK

Maulidya Rahmi 14060095/2014 : Pengaruh Tingkat Putus Sekolah, Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas di Indonesia, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Di Bawah Bimbingan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh tingkat putus sekolah SD Terhadap Kriminalitas di Indonesia. (2) Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kriminalitas di Indonesia. (3) Pengaruh Pengangguran Terhadap Kriminalitas di Indonesia. (4) Pengaruh tingkat putus sekolah SD, kemiskinan dan pengangguran secara bersama-sama terhadap kriminalitas di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Jenis data adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu menggunakan 31 Provinsi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Tingkat Putus sekolah SD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia, (2) Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia, (3) Pengangguran tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia. (4) Tingkat putus sekolah SD, kemiskinan dan pengangguran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia.

Oleh karena itu pemerintah dan pihak berwajib diharapkan agar melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah serta lingkungan masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan terhadap pelaku tindak kriminal dan perlunya meningkatkan pendidikan orang tua serta kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar.

Kata Kunci : Tingkat Putus Sekolah SD, Kemiskinan, Pengangguran dan Kriminalitas.

KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “*Pengaruh Tingkat Putus Sekolah, Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas di Indonesia*” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Alm. Drs. Ahirmen, M.Si, selaku pembimbing (I) dan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME selaku pembimbing (II) yang telah sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Teristimewa kepada Orang Tua tercinta, terutama Mama, adikku dan keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta doa, dukungan, bantuan materi, semangat dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Ali Anis, M.S selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Melti Roza Adry, SE. ME selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Hasdi Aimon, M.Si selaku dosen penguji (1) dan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si selaku dosen penguji (2) pada Jurusan Ilmu Ekonomi

Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi tercinta yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, organisasi, dan bantuan moral, material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bapak ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Perpustakaan Induk Universitas Negeri Padang yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Kak Asma Lidya, Amd (Kak Lid) yang memberikan masukan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah menyediakan data pada penelitian penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu cleaning service serta Satpam Fakultas Ekonomi yang telah membantu menjaga kenyamanan kami selama perkuliahan.
11. Kepada Ormawa Se-lingkungan Fakultas Ekonomi karena telah memberikan penulis banyak pengalaman serta keluarga baru.
12. Kepada Gifa Herman putra, Nofrizal, Putriani, Annisatul Husnah yang sangat membantu penulis selama masa perkuliahan memberikan motivasi, semangat serta doanya.
13. Kepada Nailil Fitri, Rimma Pebbi, Yuli Afmi, Nadya Centia, Anna Willia, Endang Putri, Hikmah J, Tria Agustin yang telah menjadi keluarga kesekiannya di Fakultas Ekonomi.
14. Kepada Mardianti Rukmana, Aulia Baiyuri, Novril, Muhammad Fajar, Reza Refki, Fauzan yang telah bersama dan selalu memberikan canda tawanya.

15. Kepada Adik-adik Angkat Krida, Adik-Adik Ilmu Ekonomi 15-seterusnya, Adik-Adik Se Fakultas Ekonomi, Rekan Panitia maupun tidak se Fakultas Ekonomi.
16. Kepada senior Ilmu Ekonomi dari tahun ke tahun terimakasih telah memberikan banyak pengalaman baik untuk akademik dan non akademik.
17. Kepada Viki Anjelika, Melda Husnah, Ratih Ayunda, Yuni Sri Rahayu, Dewi Maha Rani, Siti Halimah, Siti Fatimah, Indah Rusmaidi, Livia Rahmah, Khairanisa, Jihad, Hetty, Nurul yang telah memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
18. Kepada Keluarga Ilmu Ekonomi 2014 yang telah sama-sama berjuang sejak awal hingga sekarang yang tidak bisa disebutkan satu persatu intinya terimakasih banyak atas bantuan dan partisipasinya dalam penulisan skripsi MAURA selama ini h3h3.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua Aamiin.

Padang, Agustus 2018

Penulis,

Maulidya Rahmi

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Pengertian Kriminalitas.....	12
2. Teori Permintaan Pendidikan.....	13
3. Definisi Putus Sekolah.....	17
4. Konsep Kemiskinan.....	19
5. Definisi Pengangguran.....	20
B. Penelitian Yang Relevan.....	22
C. Kerangka Konseptual.....	23
D. Hipotesis.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
Jenis Penelitian.....	26
Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
Jenis Data dan Sumber Data.....	26
Variabel Penelitian.....	27
Teknik Pengumpulan Data.....	27
Definisi Operasional.....	28
Teknik Analisis Data.....	29
1. Analisis Deskriptif.....	29
2. Analisis Induktif.....	29
a. Model Regresi Panel.....	29
b. Metode Estimasi Model Regresi Panel.....	30
c. Pemilihan Model.....	31
d. Koefisien Determinasi.....	35
3. Pengujian Hipotesis.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	39
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	41

1. Deskripsi Perkembangan Kriminalitas di Indonesia	41
2. Deskripsi Tingkat Putus Sekolah SD di Indonesia.....	44
3. Deskripsi Kemiskinan di Indonesia	48
4. Deskripsi Pengangguran di Indonesia	51
C. Analisis Induktif.....	53
D. Pembahasan Hasil Penelitian	62
1. Pengaruh Tingkat Putus Sekolah SD Terhadap Kriminalitas	62
2. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kriminalitas	64
3. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kriminalitas.....	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Simpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Total Jumlah Kejahatan Menurut 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2016.....	3
Tabel 1.2	: Persentase Anak Putus Sekolah 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2016.....	6
Tabel 3.1	: Nilai Durbin Watson.....	33
Tabel 4.1	: Total Jumlah Pencurian 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2016.....	42
Tabel 4.2	: Persentase Anak Putus Sekolah 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2016.....	46
Tabel 4.3	: Persentase Penduduk Miskin 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2016.....	49
Tabel 4.4	: Tingkat Pengangguran Terbuka 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2016.....	52
Tabel 4.5	: Hasil Pengujian Uji Chow.....	56
Tabel 4.6	: Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	57
Tabel 4.7	: Hasil Pengujian Multikolinieritas.....	59
Tabel 4.8	: Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 :Kerangka Konseptual Pengaruh Anak Putus Sekolah Terhadap Kriminalitas di Indonesia.....	24
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Jumlah Pencurian, Putus Sekolah Sekolah Dasar, Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2016	72
Lampiran 2. Hasil Uji Chow	78
Lampiran 3. Hasil Uji Hausman	79
Lampiran 4. Hasil Uji Common Effect Model (CEM)	80
lampiran 5. Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM)	81
Lampiran 6. Hasil Uji Random Effect Model (REM)	82
Lampiran 7. Tabel t-statistik	83
lampiran 8. Tabel f-statistik.....	84

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hingga saat ini sudah tidak terhitung berapa jumlah kejahatan yang terjadi di Indonesia. Semakin maju perkembangan zaman semakin berpacu seseorang untuk mengikuti segala model kehidupan, dimana mereka menghalalkan segala cara guna mendapat apa yang di inginkan walaupun dengan cara yang tidak baik. Perbuatan tersebut banyak dasarnya baik pada diri sendiri maupun atas dorongan dari orang lain. Sudah tak asing lagi, kejahatan yang terjadi kebanyakan berlatar belakang dari kondisi ekonomi dan perilaku masyarakat itu sendiri.

Kriminalitas adalah kata-kata yang berkonotasi negatif di masyarakat. Dengan semua prasangka buruk yang dilakukan masyarakat saat mendengar kata tersebut biasanya ditujukan kepada orang dewasa. Orang-orang yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, begal, dan tindak asusila dilakukan oleh oknum-oknum yang mengerti resiko dan akibat dari tindakan mereka yang melanggar norma sosial dan norma hukum yang berlaku.

Kriminalitas merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara. Berbagai kerugian telah banyak ditimbulkan oleh adanya tindak kejahatan, baik itu kerugian ekonomi, fisik, moral dan psikologis. Kriminalitas adalah sebuah permasalahan yang sering disajikan di berbagai media, baik media eletronik sampai media cetak, yang terjadi di kota besar maupun dikota kecil, dari tindak kriminal yang ringan hingga

yang besar yang meresahkan masyarakat. Tindak kriminal merupakan segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan.

Secara yuridis dalam kitab Undang-Undang Pidana tidak ada satupun tentang kejahatan buku II KUHP memberikan rumusan perbuatan-perbuatan yang dianggap kejahatan. Kejahatan sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Berhubungan kejahatan tersebut bertentangan dengan peraturan atau undang-undang, maka peraturan atau undang-undang tersebut harus dibuat terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak kejahatan.

Masalah kejahatan yang semakin pelik terjadi pada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Lingkungan masyarakat yang beragam sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak kejahatan. Lingkungan kota besar yang padat penduduk dan sibuk dengan berbagai aktifitas memudahkan terjadinya suatu tindak kejahatan. Kriminalitas itu sendiri banyak dilakukan oleh anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga menengah atas, selain itu faktor penyebab lainnya disebabkan oleh kemiskinan dan pengangguran. Berikut disajikan data total jumlah pencurian dari 31 Provinsi di Indonesia tahun 2013-2016.

Tabel 1.1 Total Jumlah Pencurian Menurut 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2016

No	Provinsi	Pencurian (Ribu)			
		2013	2014	2015	2016
1	Aceh	1.242	1.159	1.732	1.568
2	Sumatera Utara	2.448	2.227	2.004	2.145
3	Sumatera Barat	1.079	1.340	1.531	1.632
4	Riau	760	800	765	662
5	Jambi	368	537	752	755
6	Sumatera Selatan	1.028	801	668	566
7	Bengkulu	250	213	314	560
8	Lampung	-	110	280	400
9	Kap. Bangka Belitung	255	160	208	189
10	Kepulauan Riau	729	760	815	864
11	DKI Jakarta	1.769	1.575	1.823	1.642
12	Jawa Barat	1.124	1.051	1.444	1.059
13	Jawa Tengah	1.101	1.041	1.041	867
14	DI Yogyakarta	606	576	821	628
15	Jawa Timur	702	597	901	854
16	Banten	146	206	219	200
17	Bali	581	459	378	501
18	Nusa Tenggara Barat	542	484	525	638
19	Nusa Tenggara Timur	782	969	808	908
20	Kalimantan Barat	1.549	1.254	974	997
21	Kalimantan Tengah	217	171	148	184
22	Kalimantan Selatan	581	348	375	299
23	Kalimantan Timur	643	747	832	627
24	Sulawesi Utara	901	619	625	765
25	Sulawesi Tengah	1.305	1.470	1.279	2.100
26	Sulawesi Selatan	2.140	2.078	2.306	2.194
27	Sulawesi Tenggara	771	847	474	618
28	Gorontalo	730	635	678	697
29	Maluku	326	368	399	297
30	Maluku Utara	94	126	83	69
31	Papua	824	760	903	745

Sumber : BPS, Statistik Kriminal 2013-2016

Pada Tabel 1.1 menunjukkan total jumlah pencurian di 31 Provinsi di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2013-2016. Pada tahun 2013 total jumlah pencurian tertinggi di Indonesia berada pada Provinsi Sumatera Utara sejumlah 2.448 ribu jiwa, sementara yang terendah berada pada Provinsi Maluku Utara sejumlah 94 ribu jiwa. Pada tahun 2014 total jumlah pencurian tertinggi berada pada Provinsi Sumatera Utara sejumlah 2.227 ribu jiwa dan terendah pada Provinsi Lampung 110 ribu jiwa.

Sementara pada tahun 2015 total jumlah pencurian tertinggi berada pada Provinsi Sulawesi Selatan 2.306 ribu jiwa dan terendah pada Provinsi Maluku Utara 83 ribu jiwa. Pada tahun 2016 total jumlah pencurian tertinggi di 31 Provinsi di Indonesia berada pada Provinsi Sulawesi Selatan sejumlah 2.194 ribu jiwa sementara yang terendah Provinsi Maluku Utara 69 ribu jiwa.

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat strategis dan sangat penting dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat serta dapat mengantarkan bangsa pada tahap kemakmuran. Pendidikan bagi umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus di penuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil sekelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan aspirasi untuk maju, sejahtera, dan bahagia. Salah satu fungsi sosial, pendidikan berfungsi sebagai bimbingan.

Pendidikan memberikan peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Pemberian pendidikan formal maupun non formal bagi masyarakat dari usia dini akan menghasilkan masyarakat yang berkualitas lebih baik bagi masa depan yang akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Pendidikan merupakan

landasan untuk mengembangkan diri dan kemampuan memanfaatkan segala sarana yang tersedia. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan untuk pengembangan potensi, minat dan bakat dirinya agar mereka kelak dapat menjadi penerus bangsa yang memiliki kemampuan intelektual sehingga dapat dijadikan sumber daya manusia yang berpotensi dalam memimpin bangsa dan negara kearah yang lebih baik. Namun banyak faktornya yang menyebabkan anak-anak menjadi putus sekolah. Putus sekolah merupakan masalah sosial yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena dampak yang ditimbulkan tidak lagi hanya dirasakan oleh anak itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat.

Fenomena anak putus sekolah merupakan masalah pendidikan di Indonesia yang belum terselesaikan sampai saat ini. Fenomena anak putus sekolah menjadi suatu keprihatinan pada saat ini. Hampir di setiap tempat banyak anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan. Pendidikan putus di tengah jalan di sebabkan karena berbagai kondisi yang terjadi dalam kehidupan. Seperti halnya orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari bagaimana mungkin akan memenuhi kebutuhan sekolah untuk anaknya. Meskipun pemerintah menyediakan berbagai macam bentuk bantuan dalam menunjang pendidikan di Indonesia namun jumlah anak usia wajib belajar di Indonesia bisa di katakan begitu besar. Berikut disajikan data anak putus sekolah berdasarkan jenjang pendidikan berdasarkan 31 Provinsi di Indonesia tahun 2013-2016.

Tabel 1.2 Total Persentase Anak Putus Sekolah Tingkat SD 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2016

No	Tahun	Anak Putus Sekolah (%)
		SD
1.	2013	13.34
2.	2014	7.91
3.	2015	21.83
4.	2016	21.9

Sumber : BPS – Potret Pendidikan 2013-2016

Pada Tabel 1.2 total persentase anak putus sekolah pada tingkat SD di Indonesia di lihat berdasarkan 31 Provinsi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tingkat putus sekolah SD terendah berada pada tahun 2014 sebesar 7.91 persen dan tertinggi berada pada tahun 2016 sebesar 21.9 persen.

Kriminalitas bukan merupakan warisan yang didapat sejak lahir, tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh wanita maupun pria baik pada usia anak, dewasa maupun lanjut umur. Tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang menjadi suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan. Salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh kota besar dan kota-kota lainnya tanpa menutup kemungkinan terjadi di pedesaan kriminalitas dikalangan remaja, hampir setiap hari selalu ada berita tindak kriminalitas dikalangan remaja. Kriminalitas itu sendiri identik di dunia remaja karena rasa ingin tahu dan mencoba hal yang di anggap baru. Hal ini cukup meresahkan, dan fenomena ini terus berkembang di masyarakat. Tindak kriminal ada yang bersifat sembunyi-sembunyi dan ada juga yang terang-terangan. Tindak

kriminal memberikan pengaruh yang besar dalam masyarakat. Adanya kriminalitas di kalangan remaja menimbulkan pertanyaan apa yang menyebabkan terjadinya tindak kriminal.

Kriminalitas masih menjadi satu kesatuan dengan kemiskinan, setelah diperhatikan kemiskinan tidak hanya miskin harta tetapi juga miskin ilmu, miskin harga diri, miskin hati dan banyak lainnya. Masyarakat yang sudah terdesak dengan kondisi ekonomi rela melakukan apapun demi memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan mempunyai arti tidak berharta benda, serba kekurangan, kemelaratan dan kelaparan. Dengan proses pembangunan yang semakin pesat dimana proses industrialisasi dan informasi tercakup di dalamnya, baik langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses perubahan tersebut, sehingga manusia dituntut untuk bertahan hidup di era tersebut.

Bersamaan dengan proses pembangunan tersebut, banyak terjadi persaingan keras antar manusia, terutama persaingan dalam bidang ekonomi. Ekonomi serasa mempunyai peringkat nomor satu dibanding dengan bidang-bidang lainnya. Ekonomilah yang saat ini dianggap mempunyai banyak peran, terutama dalam dunia internasional. Akibat dari persaingan tersebut banyak berbagai usaha yang dilakukan orang untuk memenangkan persaingan itu sendiri dengan cara ia memperolehnya dengan hasil yang tidak baik pula.

Berdasarkan persentase penduduk miskin di 31 Provinsi di Indonesia tahun 2013 hingga 2016, mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun

2013 tingkat kemiskinan tertinggi berada pada Provinsi Papua sebesar 31.53 persen, sementara yang terendah berada pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 3.72 persen. Pada tahun 2014 tingkat kemiskinan tertinggi berada pada Provinsi Papua sebesar 27.8 persen dan Provinsi DKI Jakarta merupakan yang terendah sebesar 4.09 persen. Sementara pada tahun 2015 Provinsi Papua masih berada pada tertinggi sebesar 28.4 persen dan terendah Provinsi DKI Jakarta sebesar 3.61 persen. Selanjutnya tahun 2016 Provinsi Papua masih menjadi Provinsi tertinggi pada tingkat kemiskinan sebesar 28.4 persen dan terendah pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 3.75 persen.

Berdasarkan fenomena tersebut dalam kurun waktu empat tahun tersebut Provinsi Papua selalu berada pada tingkat kemiskinan tertinggi, dimana bisa dikatakan pada daerah tersebut penduduknya masih tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan daerah yang masih kekurangan akan perkembangan zaman. Sementara dalam tahun 2013 hingga 2016 Provinsi DKI Jakarta merupakan kemiskinan terendah karena pada daerah ini merupakan Ibu Kota Indonesia yang mana sangat pesat perkembangan teknologi.

Pembangunan dilaksanakan mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial masyarakat seperti pengangguran. Upaya menurunkan tingkat pengangguran sangatlah penting. Tingkat pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi, pengangguran disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Pengangguran

merupakan orang yang masuk angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan yang belum mendapatkan pekerjaan.

Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan serta penghasilan yang didapat mampu memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi maka tidak akan ada yang miskin dan akan menyebabkan pengangguran rendah. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya.

Pada tahun 2013 Provinsi tertinggi tingkat penganggurannya berada pada Provinsi Aceh sebesar 10.12 persen dan yang terendah pada Provinsi Bali sebesar 1.83 persen. Pada tahun 2014 Provinsi Maluku merupakan tingkat pengangguran tertinggi sebesar 10.51 persen dan terendah Provinsi Bali 1.90 persen. Tahun 2015 tingkat pengangguran tertinggi berada pada dua Provinsi yaitu Aceh dan Maluku sebesar 9.93 persen dan Provinsi Bali terendah sejumlah 1.99 persen. Selanjutnya tahun 2016 tingkat pengangguran tertinggi berada pada Provinsi Bali sebesar 8.92 persen dan terendah pada Provinsi Bali sebesar 1.89 persen.

Dilihat dari perkembangan zaman saat ini, dimana keadaan kehidupan semakin sulit dan melarat. Masyarakat yang kian miskin akan kurangnya pendidikan dengan kurangnya pendidikan menyulitkan seseorang untuk mendapat pekerjaan mengakibatkan semakin merajalela tindak kejahatan yang lebih banyaknya melakukan pencurian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang di tuangkan dalam skripsi dengan judul **“Pengaruh Tingkat Putus Sekolah, Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas di Indonesia”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Seauhmana pengaruh tingkat putus sekolah SD terhadap kriminalitas di Indonesia?
2. Seauhmana pengaruh kemiskinan terhadap kriminalitas di Indonesia?
3. Seauhmana pengaruh pengangguran terhadap kriminalitas di Indonesia?
4. Seauhmana pengaruh tingkat putus sekolah SD, kemiskinan dan pengangguran secara bersama-sama terhadap kriminalitas di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang:

1. Pengaruh tingkat putus sekolah SD terhadap kriminalitas di Indonesia.
2. Pengaruh kemiskinan terhadap kriminalitas sekolah di Indonesia.
3. Pengaruh pengangguran terhadap kriminalitas di Indonesia.
4. Pengaruh tingkat putus sekolah SD, kemiskinan dan pengangguran secara bersama-sama terhadap kriminalitas di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan hasil penelitian yang didapatkan bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bagi pemerintah sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan guna mengatasi kriminalitas di Indonesia.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian yang memiliki hubungan serupa.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Kriminalitas

Apabila kita berbicara tentang kejahatan, tentunya akan menjurus terhadap apa yang dilarang undang-undang. Dapat diungkapkan, bahwa hukum dalam memberikan arti kejahatan, terbatas terhadap apa yang dituangkan dalam undang-undang. Pandangan ahli hukum pidana dalam memberikan arti kejahatan, sering menimbulkan kekeliruan tersendiri. Dalam hal ini ada anggapan bahwa kejahatan hanya dipandang sebagai produk, misalnya sebagai produk undang-undang. Seseorang dikatakan jahat karena undang-undang mencapnya demikian. Kejahatan yang ditafsirkan sebagai produk sosial, karena kemiskinan, pengangguran dan jumlah penduduk.

Secara *juridis formal*, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Secara *sosiologis*, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma asusila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana) menurut Kartono (Rahayu, 2010:16).

Becker (1968) mengatakan bahwa “dalam ilmu ekonomi kriminalitas, individu yang melakukan tindakan kriminal cenderung disebabkan oleh faktor finansial untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dan cepat dibandingkan dengan melakukan pekerjaan legal atau berkeja pada sektor formal tanpa mempertimbangkan kerugian–kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut”. Dalam penerapannya, analisis ekonomi kejahatan lebih banyak menggunakan data kejahatan properti yaitu kejahatan atas harta benda, antara lain pencurian, perampokan, pembobolan, rumah dan lain-lain.

“Ilmu ekonomi memandang kejahatan sebagai fenomena yang harus diberantas karena dampaknya menimbulkan banyak biaya baik secara materil maupun non materil. Ilmu ekonomi mampu menjelaskan sebab dan akibat perilaku moral tersebut yang berujung pada tindakan kriminal. Ilmu ekonomi sendiri memandang kejahatan sebagai sesuatu yang menyebabkan ketidak efisienan alokasi sumberdaya dalam mengoptimalkan alokasi penggunaan sumberdaya untuk menekankan angka ketingkat angka serendah-rendahnya.

2. Teori Permintaan Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui investasi modal manusia (*human invesment*) merupakan gagasan lama. Istilah modal manusia (*human capital*) yang di perkenalkan oleh Gary S. Becker (Simanjuntak,1998). Dalam proses pertumbuhan ekonomi yang lebih menekankan pada arti penting akumulasi modal fisik. Sampai pada tahun

1950-an para ekonom mengasumsikan bahwa *labuor power* adalah tetap (*given*) dan tidak dapat ditingkatkan. Dalam pembangunan ekonomi peran mutu modal sangat penting terutama dalam peningkatan kapasitas produksi khususnya yang berkaitan dengan adanya mutu modal manusia yang tinggi. Mutu penduduk dikatakan baik bila dengan satuan waktu yang sama, seorang penduduk dapat menghasilkan output yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan mutu modal manusia perlu ditingkatkan tiga variabel utama, investasi dalam modal manusia, salah satunya pendidikan kemudian kesehatan dan yang ketiga adalah keamanan.

Dalam teori “Human Capital” diasumsikan bahwa seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan seperti yang dikemukakan oleh Simanjuntak (1998: 70) bahwa setiap tambahan satu tahun sekolah berarti disatu pihak dapat meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang, pada pihak lain berarti memudahkan penerimaan penghasilan seseorang selama menuntut pendidikan. Faktor yang menjadi perhatian utama adalah faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi keputusan untuk mengikuti pendidikan formal dan training, putus sekolah, mengulang kelas, lamanya menduduki sekolah formal serta konsekuensi dari berbagai indikator terhadap individu. Misalnya produktivitas individu, pencapaian pendidikan serta eskternalitas pendidikan baik dalam rumah tangga, seperti keadaan gizi anak, keadaan keluarga yang pada akhirnya dampak tersebut erat kaitannya dengan kesejahteraan rumah tangga.

Berbagai alasan dapat diungkapkan mengapa terjadi putus sekolah. Alasan tersebut misalnya kekurangan gizi, ekonomi rumah tangga dan lain-lain.

Elfindri (2001:75) mengungkapkan bahwa putus sekolah merupakan siswa yang berhenti sekolahnya karena tidak cukup biaya sekolah atau kemiskinan, pendidikan orang tua terutama pendidikan ayah, status keluarga berencana, tempat tinggal yang jauh dari sekolah, rata-rata konsumsi rumah tangga, alat penerang rumah tangga dan beban anggota rumah tangga. Jika uang dikeluarkan untuk pendidikan, training, dan pelayanan kesehatan seperti investasi modal manusia, sepanjang investasi tersebut akan meningkatkan penghasilan, semasa daur hidup (*life time earnings*). Investasi modal manusia akan menghasilkan manfaat baik untuk individu maupun manfaat sosial dan masyarakat keseluruhan.

Alasan ekonomi penting dijadikan alasan bahwa setiap memperluas jangkauan anak usia sekolah berarti meningkatkan akses kependidikan formal. Kebijakan pendidikan tentu bertujuan untuk mengefektifkan peranan pemerintah. Upaya-upaya tersebut akan lebih berarti bila kendala-kendala pendidikan dapat diperkecil khususnya bagi anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin. Sebagian besar masyarakat dinegara-negara berkembang (terutama golongan miskin) menginginkan pendidikan bukan karena alasan-alasan atau manfaat yang bersifat non ekonomis (reputasi, gengsi, kepuasan batin) melainkan hanya sebagai suatu wahana dalam permintaan akan pendidikan bisa dipastikan semakin lama akan semakin meningkat.

Lebih lanjut, Todaro (2004:425) mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan yang dienyam oleh seseorang secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh kekuatan permintaan pendidikan. Faktor penentu dari sisi permintaan terhadap pendidikan ada dua hal yang paling berpengaruh terhadap jumlah atau tingkat pendidikan yang diinginkan, yaitu pertama, harapan bagi seorang siswa yang lebih baik pada sektor modern dimasa yang akan datang, hal ini merupakan manfaat pendidikan individual (*private benefits of education*) bagi siswa atau keluarganya. Kedua, biaya-biaya pendidikan baik bersifat langsung maupun tidak langsung yang harus dikeluarkan oleh siswa atau keluarganya.

Lochner (2004) menekankan peran pendidikan sebagai investasi modal manusia yang meningkatkan masa depan peluang kerja yang sah, yang enggan berpartisipasi dalam kejahatan. Jika modal manusia meningkatkan keuntungan dari pekerjaan lebih dari kejahatan, maka investasi modal manusia dan sekolah harus mengurangi kejahatan. Dengan demikian, kebijakan yang meningkatkan pendidikan atau efisiensi sekolah harus mengurangi sebagian besaar jenis kejahatan jalanan di antara orang tua dewasa. Namun, beberapa jenis kejahatan kerah putih (misalnya penggelapan, penipuan) dapat meningkatkan pendidikan jika mereka cukup keterampilan yang dipeelajari di sekolah.

Pendidikan juga mengajarkan individu untuk menjadi lebih baik (Becker dan Mulligan:1997 dalam Randi Hjalmarsson dan Lance Loncer:

2012). Hal ini akan mencegah kejahatan, karena individu menempatkan hal yang lebih besar pada masa hukuman setiap yang terkait dengan kegiatan kriminal mereka. Untuk preferensi waktu dipengaruhi oleh pendidikan kejahatan yang terkait dengan hukuman penjara yang lama (atau konsekuensinya jangka panjang lainnya). Pendidikan juga dapat mempengaruhi preferensi terhadap risiko. Jika sekolah lebih membuat individu berisiko, maka harus mencegah kejahatan dengan tersebarnya efek pada pelanggaran yang memerlukan ketidakpastian yang cukup besar dalam pengembalian atau hukuman. Sekolah dapat mempengaruhi orang-orang berinteraksi setiap hari di sekolah, pekerjaan atau lingkungan mereka. Dengan asumsi orang lebih berpendidikan lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang berpendidikan lain yang kurang cenderung untuk terlibat dalam kejahatan. Dalam kebanyakan kasus, mekanisme yang berkaitan dengan perubahan preferensi atau interaksi sosial menunjukkan bahwa pencapaian pendidikan cenderung mengurangi sebagian besar jenis kejahatan. Kesimpulannya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan dapat mengurangi kriminalitas di lingkungan masyarakat.

3. Definisi Putus Sekolah

Kriteria putus sekolah adalah pertama mereka yang pernah duduk pada salah satu tingkat pendidikan, akan tetapi pada saat survei mereka tidak terdaftar pada salah satu pendidikan formal, atau putus sekolah pada kelas terakhir yang diselesaikan. Kedua adalah mereka yang telah

menamatkan pendidikan sekolah akan tetapi pada saat survei tidak terdaftar kesalah satu tingkat pendidikan (Elfindri, 2001:97).

Menurut Nasir (Sesmiati, 2009:18) pengertian putus sekolah adalah Proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan formal tempat dia belajar. Terlantarnya anak-anak tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai.

Gomez, 1984; Lloyd Blank dalam Elfindri (2001:96) menyatakan bahwa putus sekolah disebabkan oleh kemiskinan dan rendahnya pendidikan orang tua. Kemiskinan ini indikatornya adalah banyaknya tanggungan dalam sebuah keluarga, pendapatan dan rendahnya tingkat pendidikan dasar yang bisa dikecap oleh seseorang. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun telah dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia (RI), secara implisit kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan pendidikan kepada anak, usia 7-15 tahun untuk memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengecap pendidikan.

Sharkey, (2017 : 16) mengungkapkan bahwa terjadi perubahan tingkat putus sekolah yang tinggi pada jenjang pendidikan SMA, dimana tingkat putus sekolah tersebut dimulai kelas 9 sampai kelas Persentase remaja antara 1 dan 19 tahun yang tidak sekolah dan bukan lulusan SMA.

Gadfery, 1987:54 dalam Elfindri (2001:41) mengemukakan bahwa sasaran pengendalian putus sekolah adalah usia 13-15 tahun menjadi

concern utama mengingat kelompok usia ini diberi kesempatan untuk mengecap pendidikan dasar tanpa dikenakan biaya.

4. Konsep Kemiskinan

Pengertian kemiskinan bukanlah suatu hal yang mudah. Kemiskinan sebagai gejala ekonomi akan berbeda dengan kemiskinan sebagai gejala sosial. Kemiskinan sebagai gejala ekonomi merupakan suatu gejala yang terjadi disekitar lingkungan penduduk miskin dan biasanya dikaitkan dengan masalah kekurangan pendapatan. Sebaliknya dari segi sosial, kebudayaan kemiskinan lebih banyak terletak dalam diri penduduk miskin itu sendiri seperti cara hidup, tingkah laku dan sebagainya (Esmara, 1986:286).

Kuncoro (2006) menyatakan bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Selanjutnya seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, antara lain pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatam minimum cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro, 2000:32). Kemiskinan didefinisikan sebagai orang yang berada di bawah garis kemsikinan yang definisinya bervariasi.

Garis kemiskinan yang biasanya digunakan di Indonesia lebih rendah dari negara-negara lain.

Menurut Todaro dalam Todotua (2016) menyatakan bahwa semakin miskin seseorang maka akan semakin jauh jangkauannya untuk mendapat fasilitas yang dapat menyejahterakan penduduk. Hal ini cenderung untuk tidak mampu menyediakan pendidikan yang layak, dengan rendahnya tingkat pendidikan dan lemahnya pengetahuan tentang hukum maka hal ini yang memiliki peluang besar untuk melakukan kejahatan. Dimana dengan keterbatasan ekonomi dan mereka masih harus memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup.

5. Defenisi Pengangguran

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2007:154).

Pengangguran bukanlah suatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan dimana semua orang sama pekannya terhadap kemungkinan itu tidak peduli apapun jenis kelaminnya, umur, kebangsaan, dan jenis jabatannya dalam masyarakat. *Ceteris paribus*, tingkat pengangguran

adalah lebih tinggi bagi kaum wanita dari pada kaum pria, untuk pekerja kasar dari pada pekerja kantoran, bagi kaum remaja yang dewasa usianya. Tingkat pengangguran dikalangan remaja sangat tinggi, dalam perjalanan waktu jumlahnya sangat tinggi. Dimana remaja ini menjadi kedalam tenagakerja yang berketerampilan rendah. Karena mereka tidak ada pengalaman kerja, sehingga menyulitkan mencari lowongan di sektor ekonomi (Don Bellante, 1990 : 425).

Seseorang yang tidak bekerja atau kehilangan pendapatan menimbulkan masalah dalam kejahatan, dimana mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga menimbulkan kegiatan kejahatan. Terdapat kaitan yang sangat erat diantara kejahatan dan pengangguran. Dengan demikian usaha mengatasi pengangguran secara tak langsung menyebabkan pengurangan dalam kejahatan (sukirno: 2004 dalam Firdaus Ananta: 2013).

B. Penelitian Yang Relevan

Dalam mendukung penelitian yang penulis lakukan maka sangat diperlukan penelitian sebelumnya. Tujuannya agar dapat diketahui apakah penelitian ini sangat berpengaruh dan mendukung atau tidak dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Puspa Sari (2016) yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia. Dalam penelitian tersebut variabel yang digunakan adalah pendidikan, pengangguran, ketimpangan pendapatan dan demografi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Widi Astuti (2014) yang berjudul analisis tingkat kriminal di kota Semarang dengan pendekatan ekonomi tahun 2010-2014. Dalam penelitian tersebut variabel yang digunakan adalah pengangguran, pendidikan dan upah.

Penelitian yang dilakukan oleh Zsolt Becsi (1999) yang berjudul *economics and crime in the states*. Dalam penelitian tersebut variabel yang digunakan adalah kejahatan, kepadatan penduduk, usia, pengangguran, pendapatan, kesejahteraan, pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lance Lochner (2007) yang berjudul *education and crime*. Dalam penelitian tersebut variabel yang digunakan adalah kejahatan dan pendidikan

Penelitian yang dilakukan oleh Patrick Sharkey (2017) yang berjudul *the effect of violent crime on economic mobility* di New York. Yang berfokus pada mobilitas ekonomi itu tersendiri menimbulkan efek kejahatan kekerasan pada wilayah tertentu terhadap usia remaja. Sehingga dengan adanya hubungan antara kejahatan dan mobilitas menunjukkan penurunan terhadap tingginya angka putus sekolah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini melihat kriminalitas pada 31 Provinsi di Indonesia yang mana menjadi variabel terikatnya. Sedangkan yang menjadi variabel-variabel bebas yang digunakan adalah putus sekolah tingkat SD, kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

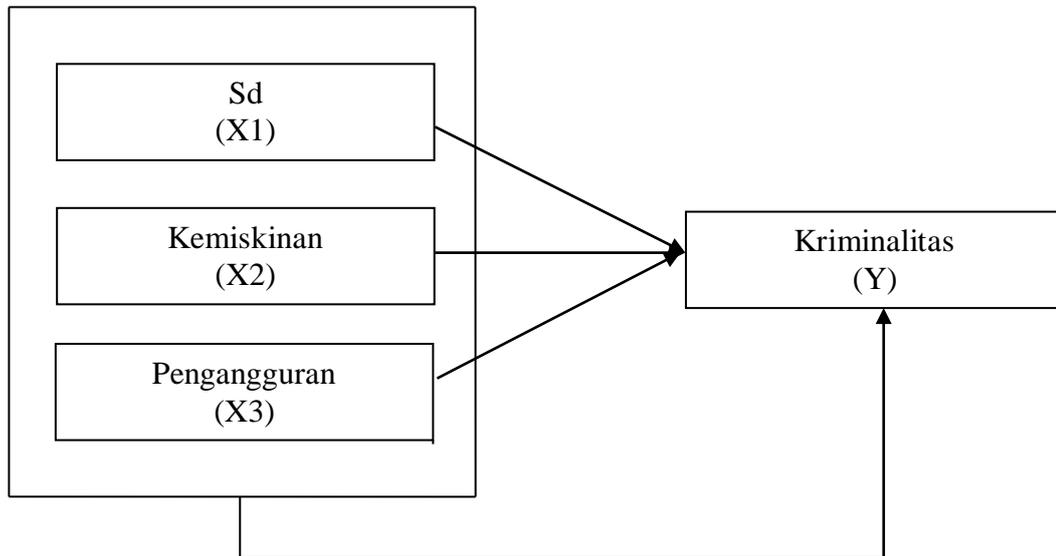
C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah keterkaitan maupun hubungan antara variabel yang diteliti yang diuraikan pada kajian teori diatas. Dalam melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Putus Sekolah, Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas di Indonesia”, variabel dependennya yaitu Kriminalitas dan variabel independennya adalah Tingkat Putus Sekolah SD, Kemiskinan dan Pengangguran. Untuk selanjutnya variabel dependen juga dipengaruhi secara bersama-sama oleh semua variabel independen.

Putus sekolah tingkat sekolah dasar berpengaruh positif terhadap kriminalitas, artinya semakin kecil putus sekolah semakin rendah kemungkinan terjadinya kriminalitas. Kemiskinan berpengaruh positif terhadap kriminalitas, artinya semakin kecil tanggungan didalam rumah tangga maka semakin kecil pula kemungkinan terjadinya kriminalitas. Pengangguran berpengaruh positif terhadap kriminalitas, artinya semakin sedikit orang yang tidak bekerja semakin sedikit pula kemungkinan untuk terjadinya kriminalitas.

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kriminalitas sebagai (Y), sd (X_1), kemiskinan (X_2), pengangguran (X_3) dari hal tersebut dapat dibuat kerangka konseptual. Berdasarkan penjelasan diatas, maka secara sistematis,

kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Pengaruh Tingkat Putus Sekolah, Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas di Indonesia.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka konseptual diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh signifikan tingkat putus sekolah dasar terhadap kriminalitas di Indonesia.

$$H_o : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Terdapat pengaruh signifikan kemiskinan terhadap kriminalitas di Indonesia.

$$H_o : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Terdapat pengaruh signifikan pengangguran terhadap kriminalitas di Indonesia.

$$H_o : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat putus sekolah tingkat sd, kemiskinan dan pengangguran terhadap kriminalitas di Indonesia.

$$H_o : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu } \beta \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil Analisis Regresi Model Panel menggunakan Fixed Effect Model dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel bebas terhadap variabel terikat seperti yang telah dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Tingkat putus sekolah SD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia.
2. Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia.
3. Pengangguran tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai pengaruh tingkat putus sekolah SD, kemiskinan, pengangguran terhadap kriminalitas di Indonesia maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pemerintah dan pihak berwajib diharapkan agar melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah serta lingkungan masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan terhadap pelaku tindak kriminal dan perlunya meningkatkan pendidikan orang tua serta kewaspadaan terhadap lingkungan.
2. Disarankan agar pemerintah setiap daerah untuk mampu mengontrol bagaimana kondisi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka sehingga terpenuhi kebutuhan akan pendidikan masyarakat.

3. Diharapkan kepada pemerintah untuk mampu mengevaluasi para tenaga kerja yang mana masih bekerja dibawah umur sehingga akan terciptanya modal manusia yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Al. 2015. *Determinan Anak Putus Sekolah Di Sumatera Barat*. Skripsi UNP
- Anata, Firdaus. 2016. *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB Perkapita, Jumlah Penduduk Dan Index Williamson Terhadap Tingkat Kriminalitas*. Universitas Brawijaya
- Astuti, Nur W. 2014. *Analisis Tingkat Kriminal di Kota Semarang Dengan Pendekatan Ekonomi Tahun 2010-2012*. Skripsi
- Bellante, Don. 1990. *Ekonomi Ketenaga kerjaan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- BPS. 2016. *Statistik Potret Pendidikan Indonesia: Jakarta*.
- BPS. 2016. *Statistik Indonesia: Jakarta*.
- BPS. 2016. *Statistik Kriminal Indonesia: Jakarta*.
- Becker, G. 1993. *Human Capital Revisited. Human Capital*. Chicago: University of Chicago Press.
- Becsi, Zsolt. 1999. *Economics and Crime In The States*. The Journal Federal Reserve Bank of Atlanta
- Carolina, Lanny. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Praktek Prostitusi*. Skripsi
- Elfindri. 2001. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Padang: Universitas Andalas
- Gujarati, Damodar, Sumarno Zein. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Gujarati, Domar N. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Terjemahan Sumarno Zain. Erlangga: Jakarta
- Hararap, Nurul. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Sumatera Utara*. UNIMED
- Intan, Rahayu PS. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Provinsi Sumatera Barat*. Skripsi
- Lochner (2004) dalam Hjalmarsson, Randi and Lance Lochner. 2012. "The Impact of Education on Crime: International Evidence". Research Report. Hlm. 49-50.